

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi adalah kebijakan untuk pemerintah daerah, agar dapat menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Setiap pemerintah daerah berhak mengatur serta mengurus daerahnya sendiri termasuk juga pada pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Sementara itu Koswara (2000) menyebutkan bahwa otonomi daerah sebagai landasan untuk berekspresi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman daerah. Berdasarkan dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi dan desentralisasi berkaitan satu sama lain. Otonomi daerah adalah dasar hukum yang mengatur tentang pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah tersebut dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, dan kebutuhan daerah itu sendiri untuk memperlancar pembangunan di suatu daerah.

Otonomi daerah yang telah berlaku di Indonesia didasarkan kepada UU Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999. Dalam UU menjelaskan bahwa pemerintah memisahkan fungsi eksekutif dan legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai (legislatif) (Halim, 2011). Dari Undang-Undang tersebut juga dijelaskan, daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya, sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat di daerahnya. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Otonomi daerah, menjadikan pemerintah daerah memiliki hak yang lebih dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-

masing. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya secara mandiri, dan tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab yang dimaksud adalah upaya pemerintah dalam membiayai dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Menurut Suwandi (2005) dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Halim (2010) Daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah dekosentrasi, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut atas dasar asas desentralisasi pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam satu periode akuntansi. Belanja daerah biasanya dieralisasikan dan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. merupakan rencana keuangan pemerintah daerah pada setiap periode yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Dengan adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri.

Tiga komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah, sangat mempengaruhi

keberhasilan perekonomian suatu daerah. Jika ketiganya diolahnya dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Halim (2010) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melakukan otonomi dan desentralisasi, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya adalah daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan kata lain daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, hal itu bertujuan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (dalam Dwindra,2006). Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi basis utama penerimaan daerah dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) agar daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya.

Menurut Edison (2006) dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah harus berusaha agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah.

Dari dua pernyataan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat membiayai penyelenggaraan desentralisasi daerah, namun selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah juga membutuhkan bantuan

dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan untuk mampu membiayai pengeluarannya baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga berperan penting untuk meningkatkan belanja daerah. Karena semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima kabupaten/kota. Dengan semakin besarnya pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik (Lina dan Lun, 2000)

Menurut Rahmawati (2010) Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya. Posisi keuangan daerah dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

Pada triwulan ke tiga tahun 2015, perekonomian Sumatera Selatan tumbuh positif sebesar 4,89 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,1 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Selatan dikarenakan Pemda telah menjalankan berbagai pembangunan infrastruktur yang strategis dan meningkatnya realisasi belanja pemerintah daerah (beritapagi.co.id).

Berikut ini disajikan mengenai jumlah belanja daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2011-2016 dalam Rupiah.

Tabel 1.1
Total Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah
2011	4.106.682.479.981,83
2012	4.886.553.394.359,91
2013	6.221.526.149.006,89
2014	6.048.607.430.664,52
2015	6.449.052.524.475,55

Sumber BPS Sumsel, 2017

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2011 hingga 2015 terjadi peningkatan jumlah belanja daerah kabupaten dan kota di Sumatera selatan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Belanja daerah di masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat.

Berikut ini disajikan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan kabupaten dan kota Sumatera Selatan periode 2011 hingga 2016 dalam Rupiah

Tabel 1.2
Total PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota Di Sumatera Selatan 2011-2015 (dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2011	1.849.119.912.016,18	1.192.557.000.412,00
2012	2.001.714.583.551,61	2.378.798.650.801,00
2013	2.021.696.787.275,10	2.649.216.454.338,00
2014	2.422.673.788.768,86	2.982.866.000.798,00
2015	2.871.976.896.280,09	2.839.125.943.171,00

Sumber BPS Sumsel 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 memperlihatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2015 dana perimbangan mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Menurut Edison (2006) Semakin besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerah manunjukkan bahwa ketergantungan daerah kepada pusat semakin kecil. Hal ini tidak terlihat dalam Tabel 1.2 dimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dana perimbangan yang selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi sumbangan dari dana perimbangan cenderung lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain PAD dan dana

perimbangan variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah PDRB karena PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi wilayah pada satuan waktu tertentu (Kuncoro, 2004). Berikut merupakan data PDRB di Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.3
Total PDRB Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2011-2015 (dalam miliar rupiah)

Tahun	PDRB
2011	182.390
2012	220.459,20
2013	232.175,05
2014	243.093,77
2015	254.022,86

Sumber BPS Sumsel 2016

Berdasarkan kondisi dan latar belakang tersebut dimana belanja daerah dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya pemikiran tersebut, maka penulis memilih judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-2015*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja daerah?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja daerah?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya. Sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah
2. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah
3. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja daerah
4. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan suatu kebijakan yang terkait dengan belanja daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penlitit tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing masing dari bab terdiri dari sub-bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian yang mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dan membahas teori baik bersifat umum ataupun khusus dalam penelitian ini. Pengembangan teori menjadi konsep dasar pada penelitian ini untuk dijadikan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan data yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis penelitian yang telah diteliti dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengambil simpulan berdasarkan dengan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan memberikan saran perbaikan yang dianggap perlu.

